

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi adalah fondasi utama untuk penyelenggaraan organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan, administrasi tidak hanya mencakup pencatatan data, pengarsipan dokumen, dan pengelolaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, kualitas administrasi akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja sebuah instansi pemerintah. (kharima & Sri Wulandari, 2020)

Namun demikian, masih banyak instansi pemerintahan di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan administrasi. Salah satu permasalahan yang paling umum ditemukan adalah metode pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Penggunaan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel tanpa sistem integrasi yang menyeluruh menyebabkan data tersebar di berbagai unit kerja tanpa sinkronisasi yang baik. Akibatnya, proses pengolahan data menjadi lambat, potensi kesalahan input meningkat, serta pengambilan keputusan menjadi tidak tepat waktu karena kurangnya akses terhadap data yang real-time dan akurat. (Santi, 2018).

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan efisiensi kerja, tetapi juga menimbulkan pemborosan sumber daya, pelaksanaan sistem administrasi yang tidak bagus dengan pelaksanaan input kerja manual sehari-hari sehingga melemahkan akuntabilitas instansi di mata publik.

Padahal, dalam era digitalisasi saat ini sistem administrasi pemerintahan telah berkembang, berbagai inovasi telah dilakukan pemerintahan dalam meningkatkan sistem administrasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengembangkan inovasi sistem SIMPEG terintegrasi untuk mengelola basis data ASN nasional melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sistem ini dirancang sebagai pusat layanan kepegawaian digital yang bertujuan untuk membina dan mengawasi administrasi kepegawaian secara nasional. Dengan implementasi SAPK, BKN mampu melakukan pencatatan, pemutakhiran data, hingga pelayanan administrasi kepegawaian seperti pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, dan pensiun secara lebih cepat dan transparan. Sistem ini juga mendukung sinkronisasi data antara instansi pusat dan daerah, sehingga informasi kepegawaian dapat dikelola secara real-time dan akurat. Keberadaan SAPK menjadikan sistem administrasi di BKN tidak hanya terpusat dan terintegrasi, tetapi juga lebih efisien dalam mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis digital.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, administrasi memiliki peran yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran operasional birokrasi. Fungsi utama sistem administrasi adalah untuk mengelola, menyimpan, dan mengatur berbagai proses dan data administratif secara terstruktur dan efisien guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas

kerja, transparansi layanan publik, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi dan modern seperti SAPK atau sistem sejenis yang mampu mengotomatisasi proses administrasi secara digital.

Kepolisian daerah Sumatera Barat memiliki inovasi tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi yang terintegrasi melalui penerapan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP).

ERP adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam organisasi, termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan data administrasi. Dengan sistem ERP, setiap unit dalam organisasi Terkoneksi dan berkomunikasi langsung, sehingga aliran data menjadi lebih cepat, transparan, dan terkontrol. Dalam konteks pemerintahan, ERP mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi duplikasi data, serta mendukung prinsip good governance melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi. (Muhajirin et al., 2021)

Polda Sumatera Barat sebagai salah Sebuah instansi penegak hukum yang berada di bawah struktur Kepolisian Republik Indonesia pun tidak luput dari persoalan administrasi yang rumit. Pengelolaan data kepegawaian, logistik, dan keuangan masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang utuh. Hal ini menyebabkan proses administrasi membutuhkan waktu yang lebih lama dan mudah sering terjadi kesalahan. Selain itu, kendala dalam koordinasi antar bagian juga menjadi hambatan dalam pencapaian efisiensi kerja. (Purwati et al., 2024)

Melihat realitas tersebut, implementasi sistem ERP di Polda Sumatera Barat menjadi suatu kebutuhan mendesak. Diharapkan dengan adanya sistem ERP, seluruh data administrasi dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Polda secara optimal. Implementasi ERP juga dapat menjadi contoh penerapan teknologi informasi yang mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik di lingkungan Kepolisian. (Spathis & Constantinides, 2004; Morris, 2011; Summer, 2013 dalam jurnal Widyaningdyah, 2019)

Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi utama adalah aplikasi E-DUMAS, yang merupakan singkatan dari Elektronik Pengaduan Masyarakat.

Aplikasi ini digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik atau dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian secara langsung dan transparan. Aplikasi E-DUMAS yang diluncurkan oleh polda sumbar telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat memberikan berbagai kemajuan dalam pelaporan dan pengaduan masyarakat, Aplikasi E-DUMAS mudah di akses oleh setiap individu yang ingin menyampaikan pengaduan secara online,

E- DUMAS juga menyediakan layanan untuk memantau status laporan secara langsung serta menerima notifikasi perkembangan kasus melalui aplikasi.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi sistem ERP dalam pengelolaan administrasi di polda Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai manfaat, tantangan dan dampak dari penerapan ERP terhadap

efisiensi kerja administrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya institusi Kepolisian.

Oleh karena itu berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI SISTEM ERP DALAM PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DI POLDA SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelaporan administrasi di polda Sumatera Barat?
2. Apasaja manfaat yang timbul setelah penerapan sistem ERP terhadap kinerja administrasi dan pengelolaan data di polda Sumatera Barat?
3. Bagaimana penerapan sistem ERP dalam aplikasi E-DUMAS dapat meningkatkan transparansi dalam proses administrasi di polda Sumatera Barat?
4. Apa saja kendala dan tantangan yang di hadapi dalam penerapan integrasi ERP dengan aplikasi E-DUMAS pada pengelolaan administrasi di Polda Sumatera Barat?
5. Apa saran dalam mengatasi kendala dan tantangan yang ada dalam pengelolaan administrasi di Polda Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari magang ini yaitu

1. Untuk mengetahui Implementasi sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelaporan administrasi di polda Sumatera Barat

2. Untuk mengidentifikasi dampak yang timbul setelah penerapan sistem ERP terhadap kinerja administrasi dan pengelolaan data di polda Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis bagaimana sistem ERP dalam Aplikasi E-DUMAS dapat meningkatkan transparansi dalam proses administrasi di polda Sumatera Barat
4. Untuk mengkaji apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan integrasi ERP dengan Aplikasi E-DUMAS dalam pengelolaan administrasi di Polda Sumatera Barat
5. Untuk meneliti saran yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan administrasi di Polda Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubung dengan kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan bisa mendapatkan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Studi ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu, terutama dalam bidang sistem informasi manajemen dan administrasi publik. Temuan dari kajian ini juga dapat dijadikan referensi akademik dalam memahami penerapan ERP di sektor pemerintahan, khususnya kepolisian, serta menambah literatur mengenai birokrasi yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi sistem ERP dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelaporan administrasi di Polda Sumatera Barat. Menyajikan informasi tentang manfaat sistem ERP terhadap peningkatan kinerja administrasi dan pengelolaan data kepegawaian

secara real-time, akurat, dan terintegrasi. Menjelaskan bagaimana sistem ERP dapat mendukung transparansi dalam proses administrasi, sehingga membantu upaya reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas

Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi sebelum penerapan sistem ERP, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan sistem administrasi di lingkungan Polda maupun instansi lain yang serupa.

3. Manfaat Penelitian bagi Polda Sumatera Barat

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi Polda Sumatera Barat dalam memperbaiki kualitas pengelolaan administrasi dan data kepegawaian. Melalui kajian ini, Polda Sumbar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan sistem ERP dalam mendukung efisiensi kerja, transparansi proses administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan cepat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang masih dihadapi dalam proses administratif, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa organisasi secara keseluruhan.

1.5 Metode penelitian

1. Primer

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari sumber pertama dengan melakukan wawancara dengan staff administrasi atau pengelola sistem ERP di Polda Sumatera Barat untuk mengetahui penerapan secara langsung.

2. Sekunder

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari literatur tentang sistem ERP, laporan terkait pengelolaan administrasi, dan dokumen resmi terkait sistem ERP dan pengelolaan administrasi dari Polda Sumatera Barat.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja. Kegiatan magang dilaksanakan Di Kantor Polisi Daerah Sumatra Barat

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah yang sudah di uraikan, penulis memandang bahwa untuk memudahkan pengelolaan data dan pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi di kantor polisi daerah Sumatera barat adalah dengan menggunakan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang akan mempermudah dalam pengelolaan data yang terintegrasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan proposal ini di kelompokkan dalam lima bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari delapan sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini membahas mengenai pengelolaan data dan pelaporan

di kantor polisi daerah secara umum untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan administrasi di polda Sumatera barat dengan implementasi *enterprise resource planning* (ERP)

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menerangkan profil lembaga meliputi Sejarah, Visi dan misi, Tujuan, Lokasi dan Struktur Organisasi pada Kantor polisi daerah Sumatera barat

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dan pembahasan lanjutan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Implementasi sistem ERP dalam pengelolaan data dan pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi di polda Sumatera barat”

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dan berguna untuk perbaikan di masa mendatang.

